

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP
TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA
PANDEMI COVID 19 MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten
Lampung Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Salah
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Oleh :
BADARUZZAMAN. AS
NPM : 1651010347**

Program Study: Ekonomi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H /2022 M**

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP
TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA
PANDEMI COVID 19 MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten
Lampung Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Salah
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

Oleh :

Badaruzzaman. As

NPM : 1651010347



Program Study: Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E.

Pembimbing II : Ersi Sisdiyanto, M. Ak., CSR

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H /2022 M**

ABSTRAK

Yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian ini adalah keinginan penulis mengenai bagaimana pengelolaan dana desa mempengaruhi kesejahteraan masyarakat pada era pandemi covid 19 di Kecamatan Balik Bukit serta bagaimana dampak pengelolaan dana desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada era pandemi covid 19 di Kecamatan Balik Bukit menurut perspektif Ekonomi Islam dari latar belakang tersebut penulis ingin mengetahui pengelolaan dana desa di kecamatan Balik Bukit terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat menurut perspektif Ekonomi Islam.

Metode penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Proses penelitian yang dilakukan dengan metode lapangan yang bersifat deskriptif analisis data primer di peroleh langsung dari responden mengenai Pengelolaan Dana Desa terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat sedangkan data sekunder berupa teori teori dan data penunjang lainnya di peroleh dari perpustakaan, kantor camat Balik Bukit, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Desa di Kecamatan Balik Bukit sudah di distribusikan dengan baik walaupun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan yang di harapkan karena ada beberapa desa di kecamatan Balik Bukit pembagian proporsinya belum terlaksana dengan baik contohnya dalam pengelolaan badan usaha milik desa kebanyakan Desa Desa di Kecamatan Balik Bukit tidak terlalu terfokus terhadap badan usaha milik desa sehingga tidak berjalan dengan baik.

Kata Kunci : ADD, Kesejahteraan Masyarakat dan Perspektif Ekonomi Islam

ABSTRACT

What is behind me doing this research is that I want to know how the management of village funds affects the welfare of the community in the era of the covid 19 pandemic in Balik Bukit District and how the impact of village fund management on the level of community welfare in the era of Covid 19 in Balik Bukit District according to the perspective of Islamic Economics From this background the author wants to know the management of village funds in the Balik Bukit sub-district on the level of community welfare and to find out how the level of community welfare according to the perspective of Islamic Economics.

The research method used in this research is qualitative research. The research process carried out with a descriptive field method, primary data analysis was obtained directly from respondents regarding Village Fund Management on the Level of Community Welfare, while secondary data in the form of theories and other supporting data were obtained from the library, Bakik Bukit sub-district office, documentation and observations.

The results of this study indicate that the Village Fund in Balik Bukit Subdistrict has been distributed well although in its implementation it has not been as expected because there are several villages in the Balik Bukit sub-district that the proportion distribution has not been carried out properly, for example in managing business entities owned by the village, most of the Villages in The Balik Bukit sub-district is not too focused on village-owned enterprises so that it does not run well.

Keywords: ADD, Community Welfare and Islamic Economic Perspective



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTASEKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Badaruzzaman. As
NPM : 1651010347
Jurusan/ Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Covid 19 Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya peyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Desember 2022
Penyusun



**Badaruzzaman. As
NPM: 1651010347**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA PANDEMI COVID 19 MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat)

**Nama : Badaruzzaman, As.
NPM : 1651010347
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E
NIP. 197905142003121003**

**Ersi Sisidianto, M. Ak., CSR
NIP. 198611102019031012**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah**

**Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy.
NIP. 198208082011012009**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA PANDEMI COVID 19 MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat)”**, disusun oleh **Badaruzzaman, As., NPM : 1651010347** Jurusan **Ekonomi Syariah**, telah diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. **Senin, 14 November 2022**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. H. Nasruddin, M. Ag

(.....)

Sekretaris : Gustika Nurmalia, S.E.I., M.Ek.

(.....)

Penguji I : Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy

(.....)

Penguji II : Dr Ahmad Habibi, S.E., M.E.

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisni Islam



Prof. Titas Surtanto, S.E., M.M., Akt. C.A

NIDN 09262008011008

MOTTO

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رَاحَتُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ

مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

*Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
(Q.S Al-Anfal : 46).*

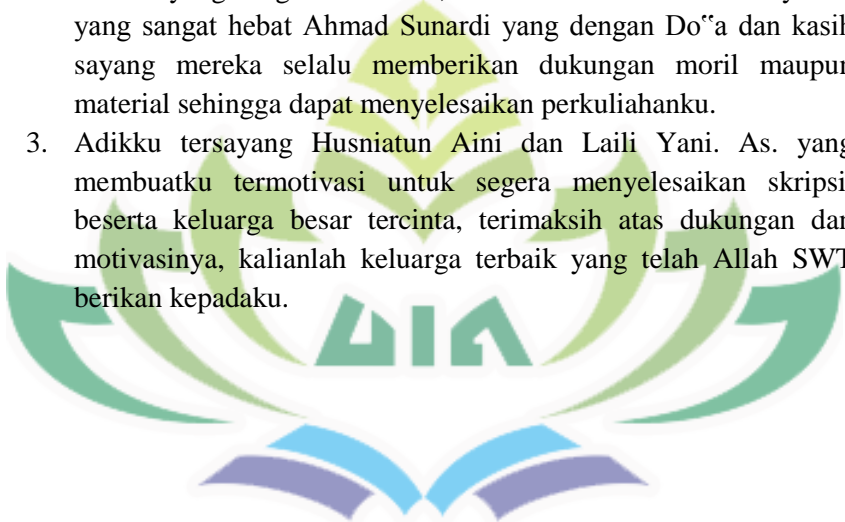


PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih saya yang mendalam kepada:

1. Rasa syukur yang teramat besar kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, pertolongan dan berkah yang amat besar sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini pada saat yang terbaik.
2. Wanita yang sangat aku cintai, ibuku tercinta Hirna dan Ayahku yang sangat hebat Ahmad Sunardi yang dengan Do" a dan kasih sayang mereka selalu memberikan dukungan moril maupun material sehingga dapat menyelesaikan perkuliahanku.
3. Adikku tersayang Husniatun Aini dan Laili Yani. As. yang membuatku termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi, beserta keluarga besar tercinta, terimakasih atas dukungan dan motivasinya, kalianlah keluarga terbaik yang telah Allah SWT berikan kepadaku.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Badaruzzaman, As. lahir pada tanggal 31 Maret 1997, di Watas, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. merupakan anak pertama dari Ibu Hirna dan Bapak Ahmad Sunardi.

Pada tahun 2003-2009 penulis mulai bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Watas, Kec. Balik Bukit, Kab, Lampung Barat, Provinsi Lampung. Kemudian pada tahun 2009- 2012 melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Liwa, Lampung Barat.

Kemudian pada tahun 2012-2015 melanjutkan pendidikan di SMK N 1 Liwa, Lampung Barat. Kemudian pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan terdaftar sebagai Mahasiswa di Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung Angkatan tahun 2016.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum Waramatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesabaran, serta tak lupa dihanturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Epektifitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Masa Vandemi Covid 19(Studi Pada Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.)”. Adapun maksud dari skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi di jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu melalui kesempatan ini saya menyampaikan perasaan terdalam kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyusun skripsi ini. Kepada mereka, dengan segenap kerendahan hati ingin menghaturkan rasa bangga dan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E.,M.M.,Akt.,CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (UIN) Raden Intan Lampung yang telah memberikan izin kepada penelitian pada proses penelitian skripsi.
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy. Selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E. Selaku pembimbing I dan bapak Ersi Sisdianto, M. Ak. CSRP selaku pembimbing II yang dengan tulus telah meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

5. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan universitas yang telah memberikan informasi, referensi, dan lain-lain.
6. Kepala Camat dan Staf-staf Kecamatan Balik Bukit Serta Kepala Desa dan Staf- staf di Desa Desa Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. yang telah membantu penulis selama penelitian berlangsung sehingga penulis mendapatkan informasi dan data yang sesuai.
7. Sahabat-sahabatku Azis Apriangga, Iwan Sanjaya, M Risky Husaini, Ilham Kholik, Ade Kurniawan Wh, yang telah memberikan semangat dan nasihat yang luar biasa kepada penulis.
8. Teman-teman jurusan Ekonomi Islam UIN Raden Intan Lampung Angkatan 2016 dan teman-teman lainnya yang telah membantu dan memotivasi penulis agar penulisan skripsi ini cepat di selesaikan.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi perbaikan dimasa mendatang. Semoga Allah SWT. Menjadikannya sebagai amal ibdah yang akan mendapat ganjaran di sisi-Nya, dan semoga ini dapat bermanfaat bagi kit semua Amin.

Bandar Lampung, 2022
Penyusun

Badaruzzaman.As.
NPM 1651010347

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Dan sub- Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
H. Metode Penelitian.....	23
I. Kerangka Pemikiran.....	31
J. Sistematika Pembahasan	31
BABII LANDASAN TEORI	33
A. Kajian Pustaka.....	33
B. Pengelolaan Dana Desa.....	34
C. Epektifitas Dana Desa	43
D. Konsep Kesejahteraan Masyarakat	44
E. Tinjauan Umum Tentang Ekonomi Islam.....	50

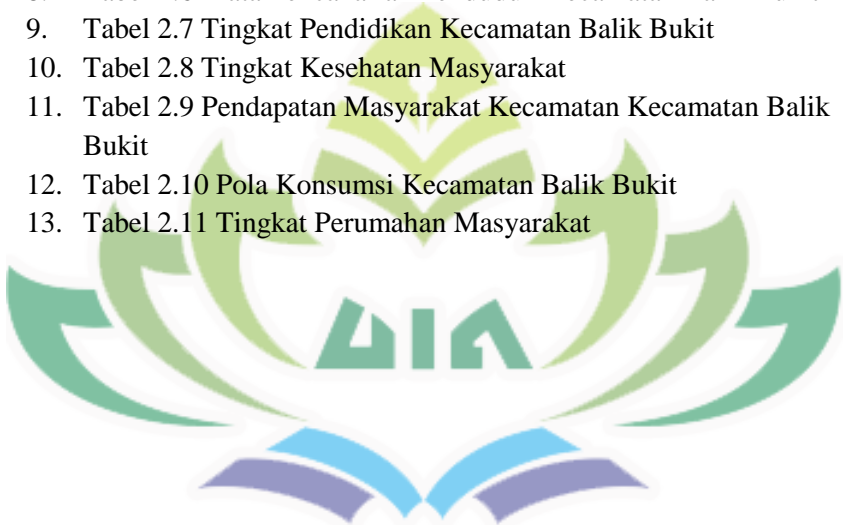
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	63
A. Gambaran Umum Objek.....	63
B. Penyajian Fakta Dan Data Penelitian	71
C. Program Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Balik Bukit.....	76
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	113
A. Analisis Data Penelitian	113
B. Program Alokasi Dana Desa Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rerspektif Ekonomi Islam.....	119
BAB V PENUTUP	127
A. Simpulan	127
B. Rekomendasi.....	128

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Jumlah Dana Desa
2. Tabel 2 Jumlah Populasi Penelitian
3. Tabel 2.1 Luwas Wilayah Kecamatan Balik Bukit
4. Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Per Desa Kecamatan Balik Bukit
5. Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kecamatan Balik Bukit
6. Tabel 2.4 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Kecamatan Balik Bukit
7. Tabel 2.5 Jumlah Prasarana Kesehatan Kecamatan Balik Bukit
8. Tabel 2.6 Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Balik Bukit
9. Tabel 2.7 Tingkat Pendidikan Kecamatan Balik Bukit
10. Tabel 2.8 Tingkat Kesehatan Masyarakat
11. Tabel 2.9 Pendapatan Masyarakat Kecamatan Kecamatan Balik Bukit
12. Tabel 2.10 Pola Konsumsi Kecamatan Balik Bukit
13. Tabel 2.11 Tingkat Perumahan Masyarakat



DAFTAR LAMPIRAN.

Lampiran Responden
Lampiran wawancara
Lampiran Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap arti dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Adapun judul skripsi ini “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pada Pandemi Covid 19 Menurut Perspektif Ekonomi Islam” untuk itu perlu di uraikan pengertian istilah-istilah judul sebagai berikut:

1. Efektivitas

efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.¹

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumberdaya yang di perlukan untuk mencapai atau menyelesaikan tujuan tertentu.²

3. Dana Desa

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.³

4. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah salah satu kondisi terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya

¹Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2007),h. 4.

²Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2, No.4, h. 597-602

³P3EI, *Ekonomi Islam*(Jakarta: Rajawali Pers, 2011),h. 19.

pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana tercukupinya kabutuhan jasmani dan rohani.⁴

5. Perspektif

Perspektif adalah cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap sesuatu yang akan menambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.⁵

6. Ekonomi Islam

Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an dan sunnah.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan judul adalah menggambarkan bagaimana sasaran target yang ingin dicapai ialah dana desa di kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di era pandemi Covid 19 yang kemudian ditinjau dalam perspektif Ekonomi Islam.

B. Alasan Memilih Judul.

1. Secara Objektif

- a. Penulis ingin mengetahui bagaimanakah peran dana desa (DD) terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada masa Pandemi Covid 19 Sehingga dana desa dapat

⁴Rudi Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UUPSTIM YKPN, 2012), h. 145.

⁵Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung Pustaka Seti, 2013), h. 249.

⁶P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2007),h. 4.

⁶Departemen Pendidikan, *Kamus Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Gamedia, 2017), h. 83.

⁶P3EI, *Ekonomi Islam*(Jakarta: Rajawali Pers, 2011),h. 19.

⁶Rudi Badrudin, *Ekonomi Otonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 19.

meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.

- b. Judul ini dipilih karena keingintahuan penulis untuk mengetahui bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap perilaku masyarakat dalam penggunaan Dana Desa.

2. Alasan Subjektif

1. Bahasan di dalam skripsi ini sesuai dengan jurusan yang penulis pelajari di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sehingga di harapkan dapat menambah wawasan bagi penulis maupun pembaca nantinya.
2. Tersedianya referensi yang mendukung sehingga dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian tersebut.
3. Sesuai dengan jurusan penulisan dengan meneliti Efektifitas Pengelolaan dana desa terhadap Tingkat kesejahteraan masyarakat di kecamatan balik bukit kabupaten Lampung barat pada masa covid 19 menurut perspektif ekonomi islam, dan juga dapat menambah pengetahuan penulis tentang pembangunan.

C. Latar belakang masalah.

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Prinsip utama otonomi desa adalah kewenangan membuat keputusan sendiri melalui semangat keswadayaan yang telah lama dimiliki oleh desa, dalam suatu kesatuan wilayah perdesaan. Berdasarkan konteks pembangunan daerah, pemerintah desa merupakan unit terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak strategis terhadap keberhasilan program pembangunan dalam memperkuat desa dan

lembaga kemasyarakatan.⁷

Sesuai dengan ketentuan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 penyelenggara otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Disamping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan sebagai prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.⁸

Dengan diterbitkan Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa posisi pemerintahan desa menjadi semakin kuat ini karena pemerintah desa diyakini lebih mampu memprioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang kebutuhan permasalahan yang lebih luas dan rumit. Untuk itu pembangunan desa yang dilaksanakan harus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang Undang No. 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintahan kepada

7

Nurman, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Pekanbaru: PTRajagrafindoPersada, 2013), hal. 253-260.

⁸ Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h.2.

desa yang selama ini sudah ada.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tujuan dana desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di propinsi Lampung, Ibukota dari kabupaten Lampung Barat adalah Liwa bagian dari Kecamatan Balik Bukit Kabupaten ini di bentuk berdasarkan undang undang nomer 6 tahun 1991 pada tanggal 16 Agustus 1991 Kabupaten Lampung Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung utara yang beribukotakan kota Liwa. Kecamatan Balik Bukit terdiri dari sepuluh desa dan dua kelurahan. Dimana hanya sepuluh Desa yang mendapatkan Dana Desa, sedangkan kedua kelurahan di kecamatan Balik Bukit tidak mendapatkan Dana desa karena syarat untuk mendapatkan dana desa adalah desa atau setingkat lebih rendah dari kelurahan.

Berikut daftar dan jumlah dana desa yang diterima setiap desa di Kecamatan Balik Bukit.

Tabel 1.1
Jumlah Dana Desa⁹

No	Nama Desa	Total Dana Desa
1	Sedampah Indah	1.346.993.000
2	Padang Cahya	1.927.144.000
3	Kubu Prahu	1.271.172.000
4	Sebarus	1.515.576.000
5	Watas	1.301.809.000
6	Gunung Sugih	1.262.368.000
7	Way Empulau Ulu	1.492.844.000
8	Padang dalam	1.219.065.000
9	Sukarami	1.469.170.000
10	Bahway	1.557.297.000
Jumlah		14.363.438.000

Sumber: Data Primer Diolah Tahun2020

Kesejahteraan masyarakat adalah salah satu kondisi terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas, atau kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.¹⁰ Sebagaimana firman Allah dalam surah An Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

⁹<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/156988/perbup-kab-lampung-barat-no-4-tahun-2020>

¹⁰Rudi Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UUPSTIM YKPN, 2012), h. 145.

Artinya “*barangsiapa mengerjakan kebaikan, baik laki laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan*”(Q.sAnNahl:97)

Kesejahteraan merupakan tujuan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari *rahmatan lil alamin* yang diajarkan oleh agama islam. Dalam Al Qu’ran. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi apa yang dilarang-Nya.¹¹

Kesejahteraan merupakan jaminan dari janji Allah SWT yang diberikan kepada laki laki atau perempuan yang beriman kepada-Nya. Allah SWT juga akan membalas berbagai amal perbuatan baik orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik dari amalnya., kehidupan yang baik adalah kehidupan yang bahagia, santai, dan puas dengan rezeki yang halal, termasuk didalamnya mencakup seluruh bentuk ketenangan apapun dan bagaimanapun bentuknya.¹² Berikut adalah tabel kesejahteraan masyarakat

Tabel 1.2
Jumlah Masyarakat Sejahtera

No	Nama Desa	Masyarakat Sejahtera
1	Sedampah Indah	104
2	Padang Cahya	256
3	Kubu Prah	72
4	Sebarus	205
5	Watas	107

¹¹Dasyaf Ibnu Samsudinn, Darusalam, *Prototype Negeri Yang Damai*, (Surabaya: Media Pers, 1994), h. 66.

¹²Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy, *Terjemahan Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid IV*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1998), h. 596.

6	Gunung Sugih	85
7	Way Empulau Ulu	130
8	Padang dalam	79
9	Sukarami	216
10	Bahway	154

Sumber: Data Primer Diolah Tahun2020

Pandemi covid 19 telah meresahkan penduduk dunia termasuk negara Indonesia apalagi wabah ini telah menyerang hamper di semua wilayah Indonesia dampak pandemic covid 19 in tidak hanya pada kesehatan tetepi juga pada kondisi sosial dan ekonomi, dalam bidang ekonomi pandemic ini mengakibatkan turunnya aktivitas dalam negri, yang juga berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat, pandemi covid menekan perekonomian dari berbagai sudut tidak terkecuali terhadap perekonomian desa.¹³

Berdasarkan dari fenomena tersebut, maka fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Kec. Balik Bukit, Kab.Lampung Barat. dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Diera pandemi covid 19 Menurut Perspektif Ekonomi Islam”

D. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang maupun mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan masalah yaitu pada awal pandemic covid 19 pada tahun 2020 dalam program ADD.

¹³Khairul ikhsan dan M. Nurabdi “Ancaman krisis ekonomi global dari dampak penyebaran pirus corona (covid 19)” akmen.Vol . 17. No 1 maret 2020. H 91

E. Rumusan Masalah.

Dari uraian latar belakang yang tertulis di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Dana Desa mempengaruhi kesejahteraan Masyarakat Pada Era Pandemi Covid 19 di Kec. Balik Bukit kabupaten Lampung Barat?
2. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat pada Era Pandemi Covid 19 di kec. Balik bukit, kab. Lampung barat, dalam perspektif Ekonomi Islam?

F. Tujuan penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan Dana Desa mempengaruhi kesejahteraan Masyarakat Pada Era Pandemi Covid 19 di Kec. Balik Bukit kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Dana Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat pada Era Pandemi Covid 19 di kec. Balik bukit, kab. Lampung barat, dalam perspektif Ekonomi Islam.

G. Manfaat penelitian

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berupa ide atau gagasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai Anggaran Dana Desa (ADD) dan dampaknya terhadap Kesejahteraan masyarakat selama Pandemi Covid 19.
3. Bagi akademis atau mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan literatur dalam

melakukan penelitian selanjutnya.

4. Bagi penulis, untuk menambah wawasan sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Karaya ilmiah dengan tema pengelolaan Dana Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sejenisnya ada beberapa penulis temukan, diantaranya:

1. Sri Wulandari, “Analisis Ewektifitas Dana Desa Terhadap peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi islam di Kecamatan Sukamakmur Kecamatan Aceh Besar Periode 2015-2019” Hasil penelitian menunjukkan tingkat ewektifitas mencapai 100% berarti Dana Desa yang berjalan tergolong epektif dikarnakan baik dari segi sumber daya manusia tercukupi dengan baik untuk mengelola dana desa tersebut untuk membangun daerahnya masing masing demi keberlangsungan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan sukamakmur kecamatan Aceh Besar.¹⁴
2. Anita Wulandari, “Pelaksanaan Program Dana Desa (ADD) 2016 Terhadap Peningkatan kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Padang Cermin Kecamatan Pesawaran)” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan alokasi Dana desa di padang cermin dalam mendistribusikan ADD di kecamatan padang cermin ini sudah merata tetepi dikarnakan ada

¹⁴ Sri Wuanari, *Analisis Ewektifitas Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Pespektif Ekonomi Islam di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar Periode 2015 2018*, Jurnal Jimebis, 2020, H 1

beberapa desa yang kurang baik secara pelaksanaannya dikarenakan pembagian proporsi untuk masing-masing kegiatan belum terlaksana seperti kegiatan ekonomi produktif, sedangkan dampak program dana desa terhadap kesejahteraan di padang cermin jika dilihat dari berbagai indikator kesejahteraan masyarakat yang ada hanya 5 desa yang melakukan kegiatan ekonomi produktif.¹⁵

3. Helda Liza Safitri, “Analisis Efektitas Pembayaran, Pajak, Air, Tanah Dalam Pendapatan Asli Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Dalam perspektif Ekonomi Islam (Study kasus Pada Pengusaha Air Karawang di Desa Ambarawa Timur, Ambarawa)” Berdasarkan dari hasil penelitian di peroleh kesimpulan pembayaran pajak air tanah usaha air karawang dalam laporan realisasi pendapatan yang ditetapkan oleh dinas pendapatan daerah belum efektif karena belum mencapai target, sedangkan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar mempunyai dampak yang positif.¹⁶
4. Ahmad Zuhdi Amrulloh, “Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Jombang Jawa Timur” Hasil penelitian yang telah di paparkan dalam penelitian ini dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: pertama, tidak ada pengaruh antara pembangunan fisik terhadap BUMDes. Kedua, ada pengaruh antara program pemberdayaan terhadap BUMDes, Ketiga, ada pengaruh antara BUMDes terhadap pendapatan masyarakat, Keempat tidak ada pengaruh antara pembangunan fisik terhadap

¹⁵Anita Wulandari, *Pelaksanaan Program Dana Desa (ADD) 2016 Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2017, H 122

¹⁶Helda Liza Safitri, *Analisis Efektivitas Pembayaran Pajak Air, Tanah, Dalam Pendapatan Asli Daerah Dan Kesejahteraan masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pengusaha Air Karawang di Desa Ambarawa Timur, Ambarawa)* Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018, H 1

pendapatan masyarakat, Kelima, ada pengaruh antara program pemberdayaan terhadap pendapatan masyarakat, peran BUMDes sangat di butuhkan dalam pngellaan Dana Desa, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat desa misalnya dalam membentuk dan menumbuhkan usaha mandiri masyarakat melalui pengelolaan Dana Desa oleh BUMDes.¹⁷

5. Tiyas Rahayu Kartika, Rahma Rahayu Rengseh, Fitriah Dwi Fitriana, “Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan (study Pada Desa Trutup Plumpang Kabupaten Tubang)” Hasil penelitian menunjukkan perencanaan pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan desa musrebang yang melibatkan badan permusyawaratan desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), serta perwakilan masyarakat muserebang ini telah dilaksanakan namun pelaksanaannya lebih didominasi oleh perangkat desa masyarakat belum terlibat aktif.¹⁸
6. Endang Juliana, ”Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan”. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan dana desa telah berperan memberikan peningkatan pendapatan riil masyarakat pedesaan dan hal tersebut diakui oleh 69% masyarakat yang diwawancarai. Kebijakan Dana Desa juga memiliki peran dalam penambahan sarana dan prasarana fisik

¹⁷Ahmad Zuhdi Amrulloh, *Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Jombang Jawa Timur*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2017, H 3

¹⁸ Tiyas Rahayu Kartika, dkk, *Bagaimana Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan (Study Pada Desa Trutup Plumpang Kabupaten Tubang)*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2020, H 3

dipedesaan dan hasil kajian menemukan sebesar 86% menyatakan setuju bahwa ada nya penambahan sarana dan prasarana pedesaan.¹⁹

7. Nova Sulastri, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, dimana ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Berdasarkan hasil penelitian tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Lakapodo kepada masyarakat.²⁰
8. Kristina Korniti Kila “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur” dari jurnal tersebut diketahui secara umum pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Miau Baru tidak berjalan lancar. Seperti proses perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat Desa Miau Baru dan tidak melalui musyawarah (Musrenbang-Desa), Pada proses pelaksanaan anggaran atau kegiatan yang tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan yang telah d itetapkan

¹⁹Endang Juliani, *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan*, Skripsi USU Medan, 2017, H 2

²⁰Nova Sulasti, *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Pisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna*, Skripsi UIN Sultan Thaha Saifudin Jambi, 2016, H 1

sebelumnya.²¹

9. Arif Mauliddin, “Efektifitas Penggunaan Program Dana Desa Di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjung Kecamatan Pidie” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pembangunan yang dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dengan musyawarah bersama pembangunan jalan desa saluran pembuangan kantor desa, kantor PKK dan pagar manasah, pembangunan yang dilakukan oleh tim pelaksanaan dana desa (ADD) dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dilakukan dengan pengawasan semua pihak termasuk masyarakat.²²
10. Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang” dari jurnal tersebut diketahui sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya oprasional pemerintahan desa dan bpd sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat, dan faktor penghambatnya adalah kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat.²³

²¹Kristina Korniti Kila, *Pengelolaan Aloasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur*, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 2020, H 3

²²Arif Mauliddin, *Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Gampong Meunasah mee Kecamatan Kembang Tanjung kabupaten Pidie*, Skripsi UIN Banda Aceh, 2018, H 1

²³Chandra Kusuma Putra, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Studi pada Desa Wonorejo kecamatan Wingsari Kabipaten Malang*, Jurnal Administrasi Publik (JAF), 2018

Untuk lebih detail penelitian terdahulu dapat di lihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel1.3
Penelitian Terdahulu

NO	Nama peneliti dan tahun penelitian	Sumber	Hasil
1	Sri Wulandari, 2020	Jurnal Jimebis	Hasil penelitian menunjukkan tingkat epektifitas mencapai 100% berarti Dana Desa yang berjalan tergolong epektif dikarnakan baik dari segi sumber daya manusia tercukupi dengan baik untuk mengelola dana desa tersebut untuk membangun daerahnya masing masing demi keberlangsungan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan sukamakmur kecamatan Aceh Besar.
2	Anita Wulandari, 2017	SKRIPSI, UIN Raden intan Lampung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan alokasi Dana desa di padang cermin dalam mendistribusikan ADD di kecamatan padang cermin ini sudah merata tetepi dikarnakan ada beberapa desa yang kurang baik secara pelaksanaan nya dikarnakan pembagian proporsi untuk masing masing kegiatan belum terlaksana seperti kegiatan

			<p>ekonomi produktif, sedangkan dampak program dana desa terhadap kesejahteraan di padang cermin jika dilihat dari berbagai indikator kesejahteraan masyarakat yang ada hanya 5 desa yang melakukan kegiatan ekonomi produktif.</p>
3	Helda Liza Safitri, 2018	SKRIPSI, UIN Raden Intan Lampung	<p>Berdasarkan dari hasil penelitian di peroleh kesimpulan pembayaran pajak air tanah usaha air karawang dalam laporan ralisasi pendapatan yang di tetapkan oleh dinas pendapatan daerah belum efektif karena belum mencapai target, sedangkan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar mempunyai dampak yang positif.</p>
4	Ahmad Zuhdi Amrulloh, 2017	Jurnal Ekonomi dan Keuangan	<p>Dari penelitian ini di dapat kesimpulan Pertama, tidak ada pengaruh antara pembangunan fisik terhadap BUMDes. Kedua, ada pengaruh antara program pemberdayaan terhadap BUMDes, Ketiga, ada pengaruh antara BUMDes terhadap pendapatan masyarakat, Keempat tidak ada pengaruh antara pembangunan</p>

			<p>fisik terhadap pendapatan masyarakat, Kelima, ada pengaruh antara program pemberdayaan terhadap pendapatan masyarakat, peran BUMDes sangat di butuhkan dalam pngellaan Dana Desa, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat desa misalnya dalam membentuk dan menumbuhkan usaha mandiri masyarakat melalui pengelolaan Dana Desa oleh BUMDes.</p>
5	<p>Tiyas Rahayu Kartika, Rahma Rahayu Rengseh, Fitriah Dwi Fitriana, 2020</p>	<p>Jurnal Ekonomi dan Keuangan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukan perencanaan pengelolaan Dana Desa dilakukan melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan desa musrebang yang melibatkan badan permusyarawatan desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), serta perwakilan masyarakatmuserebang ini telah dilaksanakan namun pelaksanaannya lebih didominasi oleh perangkat desa masyarakat belum terlibat aktif.</p>
6	<p>Endang Juliani, 2017</p>	<p>SKRIPSI, USU MEDAN</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan kebijakan dana desa telah berperan memberikan peningkatan pendapatan riil</p>

			<p>masyarakat pedesaan dan hal tersebut diakui oleh 69% masyarakat yang diwawancarai. Kebijakan Dana Desa juga memiliki peran dalam penambahan sarana dan prasarana fisik dipedesaan dan hasil kajian menemukan sebesar 86% menyatakan setuju bahwa ada nya penambahan sarana dan prasarana pedesaan.</p>
7	Nova Sulasti, 2016	SKRIPSI, UIN SULTAN THAHA SAIFUDIN JAMBI	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna, dimana ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban. Berdasarkan hasil penelitian tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Lakapodo kepada</p>

			masyarakat.
8	Kristina Korniti Kila, 2020	Jurnal Ekonomi dan Keuangan	Dari jurnal tersebut diketahui secara umum pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Miau Baru tidak berjalan lancar. Seperti proses perencanaan yang tidak melibatkan masyarakat Desa Miau Baru dan tidak melalui musyawarah (Musrenbang-Desa), Pada proses pelaksanaan anggaran atau kegiatan yang tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.
9	Arif Mauliddin, 2018	SKRIPSI , UIN BANDACEH	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pembangunan yang dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dengan musyawarah bersama pembangunan jalan desa saluran pembuangan kantor desa, kantor PKK dan pagar manasah, pembangunan yang dilakukan oleh tim pelaksanaan dana desa (ADD) dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dilakukan dengan

			pengawasan semua pihak termasuk masyarakat.
10	Chandra Kusuma Putra, 2018	Jurnal Administrasi publik (JAF)	Dari jurnal tersebut diketahui sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya oprasional pemerintahan desa dan bpd sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat, dan faktor penghambatnya adalah kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat.

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri wulandari maka perbedaan penelitian yang dilakukan terletak pada teori yang di gunakan, selain dari teori yang di gunakan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian yang di gunakan penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada kecamatan, Sukamakmur, Kabupaten, Aceh Besarsedangkan penelitian yang peneliti lakukan saat ini pada Kecamatan, Balik Bukit Kabupaten, Lampung Barat.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anita Wulandari maka perbedaan penelitian yang dilakukan terletak pada teori yang di gunakan pada penelitian yang sebelumnya menggunakan teori ekonomi islam sedangkan teori yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu teori pertumbuhan, selain dari teori yang di gunakan perbedaan yang lainnya yaitu pada objek penelitian yang di gunakan penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada kecamatan, Padang

Cermin, Kabupaten, Pesawaransedangkan penelitian yang peneliti lakukan saat ini pada Kecamatan, Balik Bukit Kabupaten, Lampung Barat.

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Helda Liza Safitri maka perbedaan penelitian yang dilakukan terletak pada teori yang di gunakan pada penelitian yang sebelumnya menggunakan teori Efektivitas sedangkan teori yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu teori pertumbuhan, selain dari teori yang di gunakan perbedaan yang lainnya yaitu pada objek penelitian yang di gunakan penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada pengusaha air karawang, pada Desa, Ambarawa Timursedangkan penelitian yang peneliti lakukan saat ini pada Kecamatan, Balik Bukit Kabupaten, Lampung Barat.
4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zuhdi Amrulloh maka perbedaan penelitian yang dilakukan terletak pada teori yang di gunakan pada penelitian yang sebelumnya menggunakan teori *New Public Management*sedangkan teori yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu teori pertumbuhan, selain dari teori yang di gunakan perbedaan yang lainnya yaitu pada objek penelitian yang di gunakan penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada masyarakat Jombang Jawa Timursedangkan penelitian yang peneliti lakukan saat ini pada Kecamatan, Balik Bukit Kabupaten, Lampung Barat.
5. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tiyas Rahayu Kartika maka perbedaan penelitian yang dilakukan terletak pada teori yang di gunakan pada penelitian yang sebelumnya menggunakan teori ekonomi islam sedangkan teori yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu teori pertumbuhan, selain dari teori yang di gunakan perbedaan yang lainnya yaitu pada objek penelitian yang di gunakan penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada Kabupaten, Asahansedangkan penelitian yang peneliti lakukan saat ini pada Kecamatan, Balik Bukit Kabupaten, Lampung Barat.

6. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Endang Julianimaka perbedaan penelitian yang dilakukan terletak pada teori yang di gunakan pada penelitian yang sebelumnya tidak menjelaskan mengenai teori yang digunakan sedangkan teori yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu teori pertumbuhan, selain dari teori yang di gunakan perbedaan yang lainnya yaitu pada objek penelitian yang di gunakan penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada Kabupaten, Asahansedangkan penelitian yang peneliti lakukan saat ini pada Kecamatan, Balik Bukit Kabupaten, Lampung Barat.
7. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nova Sulastri maka perbedaan penelitian yang dilakukan terletak pada teori yang di gunakan pada penelitian yang sebelumnya menggunakan teori Efektivitas dan pengelolaan sedangkan teori yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu teori pertumbuhan, selain dari teori yang di gunakan perbedaan yang lainnya yaitu pada objek penelitian yang di gunakan penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada Kecamatan Watopute Kabupaten, Muna sedangkan penelitian yang peneliti lakukan saat ini pada Kecamatan, Balik Bukit Kabupaten, Lampung Barat.
8. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kristiani Korniti Kila maka perbedaan penelitian yang dilakukan terletak pada teori yang di gunakan pada penelitian yang sebelumnya menjelaskan mengenai pengertian dana desa sedangkan teori yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu teori pertumbuhan, selain dari teori yang di gunakan perbedaan yang lainnya yaitu pada objek penelitian yang di gunakan penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada Kecamatan, Dumoga, Kabupaten, BOLLANG Mongonow sedangkan penelitian yang peneliti lakukan saat ini pada Kecamatan, Balik Bukit Kabupaten, Lampung Barat.
9. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arif Mauliddin maka perbedaan penelitian yang dilakukan terletak pada teori

yang di gunakan pada penelitian yang sebelumnya menggunakan teori efektivitas seangkan teori yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu teori pertumbuhan, selain dari teori yang di gunakan perbedaan yang lainnya yaitu pada objek penelitian yang di gunakan penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada Kecamatan, Kemang Tanjong, Kabupaten, Pidie sedangkan penelitian yang peneliti lakukan saat ini pada Kecamatan, Balik Bukit Kabupaten, Lampung Barat.

10. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Candra Kusuma Putra maka perbedaan penelitian yang dilkukan terletak pada teori yang di gunakan pada penelitian yang sebelumnya menggunakan teori Aministrasi Pemangunan sedangkan teori yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu teori pertumbuhan, selain dari teori yang di gunakan perbedaan yang lainnya yaitu pada objek penelitian yang di gunakan penelitian sebelumnya melakukan penelitian pada Kecamatan, Singo Sari Kabupaten, Malang sedangkan penelitian yang peneliti lakukan saat ini pada Kecamatan, Balik Bukit Kabupaten, Lampung Barat.

I. Metode Penelitian

Metode merupakan aspek yang sangat penting dalam melakukan sebuah penelitian, untuk itu dalam bagian ini penulis akan menjelaskan metode yang digunakan.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu melakukan kegiatan lapangan tentu guna memperoleh berbagai data dari

informasi yang dilakukan.²⁴ Penelitian ini pada akhirnya akan dianalisa, maka proses penelitian mengangkat data dari permasalahan yang ada di lapangan (lokasi penelitian) yang berkenaan dengan peranan Dana Desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran suatu keadaan sejernih mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti. Pada umumnya penelitian ini bersifat deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.²⁵

2. Sumber Data.

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan data primer. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.²⁶ Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan Dana Desa atau yang berada disekitar tempat penelitian yang telah ditetapkan sebagai responden atau sampel. Data juga diambil dengan cara mengadakan observasi di lapangan untuk melihat kondisi nyata secara visual yang ada di lapangan. Hal yang penting untuk mengambil data yang belum terungkap oleh alat pengumpul data yang lain.

²⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), hal. 32

²⁵ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1996), hal.4

²⁶ Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 8.

3. Teknik Pengumpulandata.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian. Pada hakikatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yang penulis gunakan antarlain:

a. Observasi

metode observasi adalah “studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan”. Observasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data langsung dari objek penelitian, tidak hanya terbatas pada pengamatan saja melainkan juga pencatatan yang dilakukan guna memperoleh data yang kongkrit dan jelas. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-partisipan, dimana peneliti tidak terlibat, hanya mendapatkan gambaran obyeknya melalui masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan desa sejauh penglihatan dan terlepas pada saat tertentu tersebut, tidak dapat merasakan keadaan yang sesungguhnya terjadi pada observernya. Adapun yang menjadi obyek observasi dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa peranan anggaran dan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dan responden. Dalam hal ini peneliti akan meakukan wawancara kepada

masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dana desa untuk mendapatkan data tentang dana desa. Dalam hal ini untuk mendapatkan data-data yang ingin penulis dapatkan maka penulis melakukan wawancara bebas terpimpin kepada responden.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip dan buku-buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang dapat diperoleh dari masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata.²⁷ Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber dari dokumentasi tertulis yang sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan kongkrit.

4. Populasi dan Sampel.

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas diteliti, Adapun Populasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

²⁷Suharsimi Arikuto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 231

Tabel 1.4
Jumlah Populasi Penelitian

No	Desa	Jumlah Aparatur	Masyarakat
1	Sedampah indah	13	5
2	Padang Cahya	24	15
3	Kubu Prahua	12	4
4	Sebarus	17	9
5	Way Empulau Ulu	17	9
6	Gunung sugih	13	5
7	Watas	14	6
8	Padang dalom	14	6
9	Sukarame	19	10
10	Bahway	19	11
Jumlah		162	80

Sumber: Data Primer Diolah Tahun2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah populasi pada penelitian ini sebanyak 242 orang yang terdiri dari 162 aparatur desa dan 80 masyarakat terkait.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.²⁸ Menurut Arikunto, “apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semuanya, namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih”. Dalam menetapkan besarnya sampel (*sample size*) dalam penelitian ini didasarkan pada perhitungan yang

²⁸ M Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 58

dikemukakan oleh Slovin dan Husein Umar sebagai berikut:²⁹

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = \frac{242}{1+242(0,15)^2}$$

$$n = \frac{242}{1+242(0,0225)}$$

$$n = \frac{242}{1+5,445}$$

$$n = \frac{242}{6,445} = 37,54 = 37$$

Jadi jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 37 orang pengambilan sampel yang digunakan dengan *carapurposive samping* yaitu sampel yang di pilih dengan cermat sehingga relevan dengan desain penelitian, kriteria yang di ambil dalam penelitian ini adalah aparatur desa sebanyak 22 orang dan masyarakat yang terkait sebanyak 15 orang baik yang terlibat dalam dana desa maupun yang mendapat manfaat dari dana desa.

5. Pengolahan Data.

Pengolahan data berarti menimbang, menyaring, mengatur, dan mengklasifikasikan. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar memilih secara hati-hati data relevan yang tepat, dan berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti. Mengatur dan mengklasifikasikan ialah menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu. Selanjutnya sumber (literature) dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

²⁹ Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Sekripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 78

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup, lengkap, benar dan sudah sesuai, relevan dengan masalah.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (Al-Qur'an, hadits, dan buku-buku referensi lainnya).

c. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)

Yaitu menyusun data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

d. Sistematisasi Data (*Sistmatizing*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.³⁰

6. Analisis Data.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Data kualitatif digunakan untuk menganalisis tentang peningkatan kesejahteraan yaitu bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan adanya kegiatan usaha anggaran dana desa. Analisis data adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis dan sistematis, sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif induktif dan mengikuti tata tertib dalam mengikuti penulisan laporan-laporan yang merupakan jawaban atas

³⁰Lexy L Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Remaja Rosda Karya, 2001), hal. 161

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan cara berfikir deduktif. Yaitu metode yang bersifat umum, kemudian dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan dalam pengumpulan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

Cara menganalisis data yang diperoleh dari data, baik primer maupun sekunder, metode ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan masalah untuk memberikan pemecahan masalah dengan mengumpulkan data, menyusun atau mengklarifikasi dengan tujuan memberikan gambaran yang sistematis, aktual, akurat mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan pengembangan, desa dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah dengan menyusun hipotesis kerja, dalam hal ini dilakukan dengan jalan merumuskan suatu pernyataan yang proposional. Hipotesis kerja ini sudah merupakan teori substansif (Yaitu teori yang berasal dan masih terkait dengan data), dan perlu diingat bahwa hipotesis kerja itu hendaknya terkait dan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian.

Desain penelitian ini pada tahap pembahasan penelitian, akan berisi uraian-uraian tentang objek yang menjadi fokus penelitian yang ditinjau dari sisi-sisi teori yang relevan dengannya dan tidak menutup kemungkinan bahwa desain penelitian ini akan berubah sesuai dengan kondisi atau realita yang terjadi dilapangan.

7. Kerangka Pemikiran.

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori-teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Dasar pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah menganalisis tentang program Dana Desa bagi masyarakat guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam

perspektif Ekonomi Islam. Pada penelitian ini ingin mengetahui bagaimana efektivitas dan apa saja faktor penghambat pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Balik bukit Kabupaten Lampung Barat. Oleh karena itu, untuk memudahkan penelitian yang dilakukan serta untuk memperjelaskan pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini digambarkan suatu kerangka pemikiran secara skematis pada gambar dibawah ini:



J. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub- fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. Teori.

Memuat uraian tentang kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III. Deskripsi Objek Penelitian

Memuat uraian tentang gambaran umum mengenai Objek penelitiann serta memuat tentang penyajian Fakta dan Data penelitian.

BAB IV. Analisis Penelitian.

Memuat uraian tentang gambaran umum mengenai Analisis Data Penelitian serta berisi tentang temuan mengenai apa yang diteliti.

BAB V. Penutup.

Memuat uraian tentang simpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan memuat tentang rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Grand Theory

1. Teori Kesejahteraan.

1. *Classical Utilitarian Theory.*

Menurut teori ini, kesejahteraan dapat di peroleh seorang individu dengan memaksimalkan sumberdaya yang tersedia. Bentuk dari kesejahteraan menurut teori ini yaitu berupa tingkat kepuasan (*utility*) dan kesenangan (*pleasure*) dimana tingkat kepuasan dan kesenangan tersebut dapat di ukur secara kuantitatif prinsip bagi individu adalah mengupayakan kesejahteraan secara optimal sedangkan bagi masyarakat kesejahteraan kelompok adalah hal yang di utamakan.

2. *Neoclassical Welfare Theory.*

Teori ini menyatakan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu, dimana ketika kesejahteraan individu sudah terpenuhi maka kesejahteraan masyarakat pun dapat tercapai.

3. *New Contraction Approach Theor.*

Menurut teori ini bahwa indipidu yang rasional akan setuju dengan adanya kebebasan maksimum dalam hidupnya. Inti dari tori ini adalah setiap individu memiliki konsep yang jelas mengenai barang dan jasa serta tugas tugas dari institusi sosial yang ada. Dalam hal ini individu akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar konsep tentang barang.³¹

³¹Dr. Hallil Khusairi, M.Ag. Elex Sarmigi, S.E., M,Si. *Peluang Wisata Budaya Dan Religi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Pengaruh Budaya*

B. Pengelolaan Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.³²

2. Tujuan Dana Desa

Tujuan Dana Desa adalah:

1. Meningkatkan pelayanan publik di Desa.
2. Mengentaskan kemiskinan.
3. Memajukan perekonomian Desa.
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa.
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

3. Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dari RKUN ke RKUD:

1. Tahap I sebesar 60% paling cepat Maret dan paling lambat Juli, dengan persyaratan:
 - 1) Perda APBD
 - 2) Perda mengenai tatacara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
 - 3) Laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan realisasi

Kenduri Tuai Padi Dan Religiusitas terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kerinci, Qiara Media, 2022, H 156

³² R. Bintarto, *Interaksi Desa-Kota Dan Permasalahannya*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009). H. 12

penyerapan Dana Desa TA sebelumnya.

2. Tahap II sebesar 40% paling cepat bulan Agustus dengan persyaratan:
 - 1) Laporan Dana Desa Tahap I telah disalurkan ke RKD paling kurang 90%.
 - 2) Laporan Dana Desa Tahap I telah diserap oleh Desa rata-rata paling kurang 75%.
 - 3) Rata-rata capaian output paling kurang 50%.

4. Penggunaan Dana Desa

Prinsip Penggunaan Dana Desa:

- 1) Keadilan adalah mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membedakan.
- 2) Kebutuhan prioritas adalah mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
- 3) Kewenangan Desa adalah mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- 4) Partisipatif adalah mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat.
- 5) Swakelola dan berbasis sumber daya Desa adalah pelaksanaan secara pendayagunaan sumber daya akan Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal.
- 6) Tipologi Desa adalah mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologi antropologis ekonomi dan ekologi desayang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.³³

³³*Ibid, H 13*

5. Prioritas Penggunaan Dana Desa:

a) Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan Desa

1. Sarana Prasarana Desa terdiri dari:

- a) Lingkungan pemukiman antara lain pembangunan rumah sehat, pedestrian, drainase, dan tempat pembuangan sampah.
- b) Transportasi antara lain jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa dan tambatan perahu.
- c) Energi antara lain pembangkit listrik, tenaga diesel dan jaringan distribusi tenaga listrik.
- d) Informasi dan komunikasi antara lain jaringan internet, telepon umum dan *website* Desa.

2. Sarana Prasarana Sosial Pelayanan Dasar terdiri dari:

- a) Kesehatan masyarakat antara lain air bersih, MCK, posyandu dan polindes.
- b) Pendidikan dan kebudayaan antara lain perpustakaan Desa.

3. Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa terdiri dari:

- a) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan antara lain embung desa, irigasi desa, kapal penangkap ikan dan kandang ternak.
- b) Usaha ekonomi pertanian atau yang lainnya berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran antara lain lumbung desa, *cold storage*, pasar desa, pondok wisata, penggilingan padi dan peralatan bengkel kendaraan ber motor.

4. Sarana Prasarana Pelestarian Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam.
 - b. Penanganan bencana alam.
 - c. Penanganan kejadian luar biasa lainnya.
 - d. Pelestarian lingkungan hidup.
5. Sarana Prasarana lainnya.

Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.
- b. Pengembangan kapasitas masyarakat Desa.
- c. Pengembangan ketahanan masyarakat Desa.
- d. Pengembangan sistem informasi Desa.
- e. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.
- f. Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan atau BUMDesa bersama.
- g. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi dan kelompok masyarakat, koperasi dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya.
- h. Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- i. Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

- j. Dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya.
- k. Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ketetapan dalam musyawarah Desa.³⁴

6. Pengelolaan Dana Desa

a) Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas- luasnya tentang keuangan Desa.
2. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk memper tanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang di percayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

b) Pengelolaan Keuangan Desa

1. Perencanaan.
2. Pelaksanaan.
3. Penatausahaan
4. Pelaporan dan Pertanggung jawaban

³⁴*Ibid, H 16*

7. Pemantauan dan Pengawasan Dana Desa

Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan Dana Desa. Kementerian Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas penyaluran Dana Desa yang berbasis kinerja penyerapan dan capaian output, untuk memantau optimalisasi penggunaan dana dan pencapaian output dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pengalihan penyaluran melalui KPPN dalam mendekatkan pelayanan di daerah dan memperkuat governance dan akuntabilitas Dana Desa.

- a) Bupati/ Walikota Penetapan perkara mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa untuk memastikan hak keuangan Desa terpenuhi.
- b) Pemda/BPKAD menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD untuk memastikan penyaluran Dana Desa tepat waktu dan tepat jumlah.
- c) Bupati/Walikota. Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi penyerapan Dana Desa untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahap berikutnya.
- d) Pemda/ BPKAD Sisa Dana Desa di RKUD untuk mengetahui besaran Dana Desa yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD tahun anggaran sebelumnya.
- e) Pemda/ Pusat (Kemendes, Kemenkeu, Kemendagri)/ APIP Capaian output untuk mengetahui pemanfaatan Dana Desa.

Sinergi Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

- a. Kementerian Dalam Negeri
 - 1) *Capacity building* bagi aparat desa.
 - 2) Penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - 3) Pengelolaan, penata usahaan pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.

- 4) Penguatan Desa terhadap akses, asset dan kepemilikan lahan dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat.
- 5) Penyusunan dokumen Perencanaan Desa.
- 6) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa.
- 7) Tata cara penyusunan Pedoman Teknis Peraturan Desa.

b. Kementerian Keuangan

- 1) Penganggaran Dana Desa dalam APBN.
- 2) Penetapan rincian alokasi Dana Desa, pada peraturan Bupati/ Walikota
- 3) Penyaluran Dana Desa berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output dari RKUN ke RKUD dan dari RKUD keRKD.
- 4) Pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa.
- 5) Pelaksanaan peran aparat pengawasan internal pmda.
- 6) Pengenaan sanksi tidak dipenuhinya porsi Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% dari DAU dan DBH dalam APBD.
- 7) Pelaksanaan *capacity building* bagi aparat desa dan aparat pengelola keuangan desa.
- 8) Kementrian Desa (pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi)
- 9) Penetapan pedoman umum dan prioritas penggunaan Dana Desa.
- 10) Pengadaan tenaga pmdamping untuk Desa.
- 11) Penyelenggaraan musyawarah desa yang partisipasi.

12)Pendirian, pengurusan, perencanaan usaha, pengelolaan, kerjasama dan pembubaranBUMDes.

13)Pembangunan kawasan pedesaan.

8. Pengawasan Dana Desa

Pemerintah Pusat melakukan sinergi baik antar kementerian maupun dengan daerah dalam rangkap pelaksanaan pengawasan Dana Desa secara berjenjang dengan melibatkan partisipasi masyarakat, aparat pengawas di daerah sampai dengan KPK.

- a. Masyarakat Desa. Melakukan pemantauan pelaksanaan pembangunan Desa dan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- b. Camat. Melakukan pengawasan Desa melalui kegiatan fasilitasi.
- c. BPD/DPMP. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- d. APIP. Melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan Desa, pendayagunaan Aset Desa serta penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- e. BPK. Melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan Negara (pemeriksaan administratif).
- f. KPK. Melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang telah teridentifikasi tindak pidana korupsi.

Sinergi Pengawasan Dana Desa

- a. Kemenkeu
 - 1) Melakukan pembinaan pengawasan aparat pengelolaan keuangan desa.
 - 2) Melakukan evaluasi I terhadap penganggaran

ADD dalam perkada/ APBD.

- 3) Melakukan evaluasi II terhadap pengalokasian ADD dalam perkada/ perkada-P/ APBD-P.
- 4) Melakukan penyaluran Dana Desa.
- 5) Pemantauan dan evaluasi penyaluran Dana Desa.

b. Kemendes PDTT

- 1) Menyusun kerangka pendamping untuk peningkatan kapasitas masyarakat Desa.
- 2) Pemantauan dan evaluasi kinerja pendamping professional setiap triwulan.

c. Kemendagri

Mendorong Bupati/Walikota untuk:

- 1) Memfasilitasi penyusunan RKPDesa dan APB Desa.
- 2) Mengoptimalkan peran OPD Kabupaten/Kota dan Kecamatan dalam pendampingan penyelenggaraan.
- 3) Memberdayakan aparat pengawas fungsional.
- 4) Membina pelaksanaan keterbukaan informasi di desa.

d. Sinergi Kemenkeu, KemendesPDTT dan Kemendagri Bersinergi dalam pemantauan dan evaluasi terhadap:

- 1) Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa.
- 2) Realisasi penyaluran dari RKUD keRKD.
- 3) Sisa Dana Desa di RKUD dan RKD.

- 4) Penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.
- 5) Ketercapaian hasil penggunaan Dana Desa.

C. Efektivitas Dana Desa.

1. Pengertian Efektivitas.

Menurut Harbani Pasolong efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “Efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab di rencanakan sebelumnya dapat tercapai atau suatu kegiatan tercapai karena adanya proses kegiatan.³⁵

Sedangkan pengertian efektivitas menurut Martani dan Lubis efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya dengan kata lain suatu organisasi dikatakan efektif apabila tujuan yang telah di rencanakan sebelumnya telah tercapai.³⁶

2. Indikator Efektivitas Dana Desa

Sesuai dengan perundang-undang Nomor 13 tahun 2006 pasal 4 ayat 4, efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang sudah ditetapkan, yaitu dengan membandingkan pengeluaran dengan hasil. Dengan demikian untuk menganalisis dana desa dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi dengan target belanja, dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{realisasi belanja}}{\text{target belanja}} \times 100\%$$

Standar efektivitas menurut menteri dalam negeri No. 690.900.327 tahun 1956 tentang kriteria penilaian dan kinerja

³⁵Harbani Pasolong, *Teori administrasi* (Yogyakarta, pustaka pelajar, 2016) h.

³⁶ Martani dan Lubis, *Teori Organisasi* (Bandung, Ghalia Indonesia, 2007) h.

keuangan dapat dikatakan efektif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Hasil perbandingan atau tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
- b. Hasil perbandingan antara 90%- 100%berarti efektif.
- c. Hasil perbandingan 80%- 90% berarti cukup efektif.
- d. Hasil perbandingan 60%- 80% berarti kurang efektif.
- e. Hasil perbandingan 60% berarti tidak efektif.³⁷

Untuk menentukan keefektivitasan dana desa dapat dilihat dari 3 indikator meliputi:

- a. Ketepatan waktu
- b. Sesuai manfaat
- c. Sesuai dengan harapan masyarakat

D. Konsep Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan secara bahasa, aman, sentosa, dan makmur, Sehingga kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran.

Kesejahteraan menurut ketenaga kerjaan menjelaskan bahwa kesejahteraan adalah suatu pemenuhan kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmani dan rohani, baik maupun dari luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung atau dapat memper tinggi produktifitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Menurut Koller dalam bukunya bintarto, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan yaitu:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya;

³⁷Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 690.900.327 tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan.

2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
4. Dengan melihat kualitas hidup dari spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

2. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari indikator, indikator kesejahteraan merupakan suatu ukuran mencapai masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak.

Berikut beberapa indikator - indikator kesejahteraan masyarakat menurut organisasi sosial dan menurut beberapa ahli. Adapun menurut Muhammad Abdul Mannan, ekonomi sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai Islam.³⁸ Kesejahteraan hanya diukur dengan indikator moneter menunjukan aspek ketidak sempurnaan ukuran kesejahteraan masyarakat karena ada kelemahan indikator moneter.

a. Bappenas

Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga (Bapennas, 2000). Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumahtangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dapat

³⁸Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT Raja Gopindo Persada, 2011) H. 10.

dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

b. Biro Pusat Statistik.

Menurut BPS ada 14 (empat belas) kriteria untuk menentukan keluarga dan rumahtangga miskin seperti luas bangunan, jenis lantai, dinding, fasilitas MCK, sumber penerangan, sumber air minum, jenis bahan bakar untuk memasak, frekuensi mengkonsumsi daging, susu dan ayam, frekuensi membeli pakaian dalam setahun, frekuensi makan tiap hari, kemampuan untuk berobat, luas lahan usaha tani, pendidikan kepala keluarga, dan tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp.500,00.- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal, motor, barang modal lainnya. Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka dikatakan sebagai rumah tangga miskin tidak sejahtera.

Badan pusat statistik (BPS) menyebutkan tentang latar belakang informasi mengenai konsep dan istilah yang digunakan dalam statistik kesejahteraan sosial diantaranya adalah kondisi rumah tangga, luas lantai, daerah perkotaan atau pedesaan, probabilitas bayi mati sebelum mencapai usia 1 tahun keluhan masyarakat terdapat kesehatan, imunisasi, pasien rawat inap, status gizi, narapidana, aksi dan korban kejahatan, luas lantai, mendengarkan radio, membaca koran/surat kabar, serta menonton televisi. Dari beberapa devisi tentang indikator kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kesejahteraan meliputi:

1. Tingkat Pendapatan.

Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan an kebutuhan lain yang bersifat material.

2. Komposisi Pengeluaran

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengidentifikasi rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila presentase pengeluaran untuk makanan lebih kecil dibandingkan presentase pengeluaran untuk non makanan. Rata-rata pengeluaran rumah tangga dapat digunakan untuk melihat pola konsumsi dan tingkat kesejahteraan dari rumah tangga yang bersangkutan.

3. Pendidikan.

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintahan bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk memajukan sosial dan pembangunan bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-nilai luhur yang harus di lestarian seperti rasa

hormat kepada orang tua, kepada pemimpin kewajiban untuk mematuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku, jiwa patriotisme dan sebagainya. Pendidikan juga diharapkan untuk memupuk rasa takwa kepada Allah yang maha esa. Meningkatkan kemajuan-kemajuan dan pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan dan pertahanan keamanan secara tepat dan benar, sehingga membawa kemajuan pada individu masyarakat dan negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Pendidikan sebagai lembaga konserfatif mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a) fungsi sosialisasi,
- b) fungsi kontrol sosial,
- c) fungsi pelestarian budaya,
- d) fungsi reproduksi budaya,
- e) fungsi difusi kultural,
- f) fungsi peningkatan sosial, dan
- g) fungsi modifikasi sosial.³⁹

Menurut BPS pendidikan dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu: angka atau huruf, anket partisipasi sekolah, pendidikan yang ditamatkan, dan angka putus sekolah, dan pendidikan yang ditamatkan semakin baik. Dan semakin rendah angka putus sekolah semakin baik dan keadaan suatu daerah dan sejahtera, karena distribusi bantuan pemerintah merata. Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran sumber daya sistem pendidikan terhadap usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan pendudukan terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di

³⁹Wujaddi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: P2LPTK, 1988), H 31-42

sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung disetiap jenjang sekolah. Sehingga, nilai presentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usai sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahkan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

4. Kesehatan.

Dalam data kesehatan masuk dalam konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan definisi kesehatan menurut BPS:

- a) Keluhan kesehatan
- b) Proses kelahiran
- c) Kelahiran
- d) Penolong kelahiran oleh tenaga kesehatan
- e) Imunisasi
- f) ASI
- g) Mengobati sendiri
- h) Obat tradisional
- i) Berobat jalan
- j) Tidak termasuk dalam berobat jalan
- k) Rawat inap

5. Perumahan

Dalam data statistik perumahan masuk dalam konsumsi rumah tangga, berikut konsep dan definisi perumahan menurut BPS dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Bangunan Fisik
- b) Status Penguasaan Rumah

Dari konsep-konsep di atas maka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan pertumbuhan yang mendukung pembangunan manusia yang lebih tinggi. Indikator-indikator yang terus dikembangkan diharapkan mampu membawa korelasi positif pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Oleh karena itu pertumbuhan pembangunan harus fokus pada seluruh aset bangsa. Hasil dari pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata dan pelaksanaannya harus berdasarkan pengorganisasian kerja berkembang.

E. Tinjauan Umum Tentang Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumberdaya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.⁴⁰

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas didalam kerangka syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan Syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terdampak dalam keputusan yang apriori, benar atau salah tetap harus diterima.⁴¹

⁴⁰Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3E1), *Ekonomi Islam* (Jakarta; PT Grafindo Persada, 2011), hal. 14

⁴¹Imamudin Yuliandi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, LPPi, 2006), hal. 6

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidu Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

Sedangkan pengertian ekonomi Islam menurut para ahli adalah sebagai berikut :

a. Menurut Muhammad Abdul Manan

Islamic economics is a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam.

Jadi, menurut Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang didasarkan oleh nilai-nilai Islam.

b. M. Umer Chapra

Islamic economic was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances.

Jadi, menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

- c. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, ilmu ekonomi Islam, singkatnya, merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslimmodern.⁴²

Dari beberapa definisi di atas ekonomi Islam di atas yang relatif dapat secara lengkap menjelaskan dan mencakup kriteria dari definisi yang komperhensif adalah yang dirumuskan oleh Hassanuzzaman yaitu “Suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari keidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan manusia melakukan tanggungjawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat.

*(Islamic economics is the knowledge and application of injunctions and rules of the syariah that prevent injustice in the acquisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human beings and enable them to perform their obligation to Allah and the society).*⁴³

Hal penting dari definisi tersebut adalah istilah “perolehan” dan “pembagian” di mana aktivitas ekonomi ini harus dilaksanakan dengan menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber-sumber ekonomi. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menghindari ketidakadilan tersebut adalah syariah yang di dalamnya terkandung perintah dan peraturan tentang boleh tidaknya suatu kegiatan.

Namun perlu ditegaskan di sini perbedaan pengertian antara ilmu ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam merupakan suatu kajian yang senantiasa memperhatikan rambu-rambu metodologi ilmiah, sehingga dalam proses perkembangannya senantiasa mengakomodasikan

⁴² Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Terjemahan. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufukul Mubin (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009), hal. 28

⁴³ Imamuddin Yuliadi, Op. Cit., hlm. 8

berbagai aspek dan variabel dalam analisis ekonomi.

Ilmu ekonomi Islam dalam batas-batas metodologi ilmiah tidak berbeda dengan ilmu ekonomi pada umumnya yang mengenal pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Namun berbeda halnya dengan sistem ekonomi Islam yang merupakan bagian dari kehidupan seorang muslim. Sistem ekonomi Islam merupakan suatu keharusan dalam kehidupan seorang muslim dalam upaya untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi Islam merupakan salah satu aspek dalam sistem nilai Islam yang integral dan komprehensif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk mengetahui, memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang sesuai dengan ajaran Islami.

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

Para pemikir ekonomi Islam berbeda pendapat dalam memberikan kategorisasi terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sebagaimana dikutip Muslim H. Kara, Khurshid Ahmad mengkategorisasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam pada prinsip *Tauhid*, *Rub-biyyah*, *Khilafah*, dan *Tazkiyah*. Mahmud Muhammad Bahlily menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam: *al-ukhuwwa* (persaudaraan), *al-insan* (berbuat baik), *al-nasihah* (memberi nasihat), *al-istiqomah* (teguh pendirian), dan *al-taqwa* (bersikap taqwa).

Sedangkan menurut M. Raihan Sharif dalam *Islamic Social Framework* sebagaimana dikutip Muslim H. Kara, struktur sistem ekonomi Islam didasarkan pada empat kaidah struktural, yaitu

3. *trusteeship of man* (perwakilan manusia)
4. *co operation* (kerja sama)

5. *limite private property* (pemilikan pribadi yang terbatas)
6. *state enterprise* (perusahaan negara).

Prinsip Ekonomi Islam juga dikemukakan Masudul Alam Choudhury, dalam bukunya, *Contributions to Islamic Economic Theory* sebagaimana dikutip Muslim H. Kara, Ekonomi Islam menurutnya didasarkan pada tiga prinsip, yaitu:

1. *the principle of tawheed and brotherhood* (prinsip tauhid dan persaudaraan).
2. *the principle of work and productivity* (prinsip kerja dan produktifitas).
3. *the principle of distributional equity* (prinsip pemerataan dalam distribusi).

Menurut Adiwarman Karim, bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni tauhid, keadilan, keNabian, khilafah, dan *Ma'ad* (hasil). Di dalam buku Zainul Arifin, prinsip-prinsip ekonomi Islam itu secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumberdaya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya secara efisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggung-jawabkan di akhirat nanti.
- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Pertama, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan kedua, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat.

- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Seseorang Muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan Allah SWT dalam Q.S. An-nisa: 4:29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka-sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”

- d. Kepemilikan kekayaan pribadi akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dalam Q.S Al- Hadid: 57:7:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ
فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا هُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai

oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana kepemilikan industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum.

- e. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Prinsip ini didasari Sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa, “Masyarakat punya hak yang sama atas air, padang rumput dan api”. Sunnah Rasulullah tersebut menghendaki semua industri ekstraktif yang ada hubungannya dengan produksi air, bahan tambang, bahkan bahan makanan, harus dikelola oleh negara. Demikian juga berbagai macam bahan bakar untuk keperluan dalam negeri dan industri tidak boleh dikuasai oleh individu.
- f. Seorang muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat seperti diuraikan dalam Q.S Al Baqarah: 1:281:

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ

مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya : Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-masing diri diberi Balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).

Oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan.

- g. Seorang muslim yang kekayaannya melebihi ukuran tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Menurut pendapat para ulama, zakat dikenakan 2,5% (dua setengah persen) untuk semua kekayaan yang tidak produktif, termasuk di dalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak, dan permata, pendapatan bersih dari transaksi, dan 10% dari pendapatan bersih investasi.

3. Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam.

Al-Qur'an menggunakan beberapa istilah yang berarti kesejahteraan sosial. Di antara istilah-istilah itu yang cakupan maknanya luas dan mendalam serta menggambarkan konsep kesejahteraan sosial secara mendasar adalah istilah "al-falah" yang menjadi tujuan akhir dalam kehidupan manusia di dunia ini.⁴⁴

Pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Konsep ini sangat berbeda dengan kesejahteraan dalam ekonomi konvensional, sebab ia adalah konsep yang holistik. Secara singkat kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran Islam adalah:

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
- b. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja tetapi

⁴⁴Aisyah Amini, Pengaruh Program Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Skripsi Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Guna Memperoleh Gelar Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2018), hal. 62

juga di alam akhirat. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akherat tentu lebih diutamakan.

Istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan keadaan hidup yang sejahtera secara material-spiritual pada kehidupan dunia dan akherat dalam bingkai ajaran Islam adalah Fallah. Dalam pengertian sederhana, Fallah adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.⁴⁵

Secara kebahasaan al-falah berarti keberuntungan, kesuksesan, dan kelestarian dalam kenikmatan dan kebaikan. Sementara itu, ar-Raghib alAshfani menjelaskan bahwa perkataan al-falah dalam kosa kata Al-Qur'an mengandung dua makna, duniawi dan ukhrawi. Secara harfiah, perkataan al-falah berarti mendapatkan atau memperoleh keberuntungan. Al-falah dalam konteks keduniaan ditandai dengan keberhasilan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, dan menyenangkan dengan kebersinambungan, berkecukupan, dan bermartabat. Dalam pada itu, al-falah dalam konteks kehidupan akhirat dibangun diatas empat penyangga;

- a. kebahagiaan kekal abadi tanpa mengalami kebinasaan,
- b. berkecukupan tanpa mengalami kefakiran,
- c. kemuliaan tanpa mengalami kehinaan, dan
- d. pengetahuan tanpa mengalami kebodohan sehingga bisa dirumuskan tidak ada kehidupan yang sempurna kecuali kehidupan akhirat.⁴⁶

Menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat dalam Ekonomi Islam tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar:

- a. Agama (*al-dien*) merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada tuhan

⁴⁵Martini Dwi Pusparini, "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Muqasid As-Syari'ah)", *Islamic Economics Jurnal* Vol.1 No. 1 : Juni 2015, hal. 49

⁴⁶*Ibid*, hal. 2

- yang maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya.
- b. hidup atau jiwa (*an-nafsi*) yaitu seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan dan lain sebagainya.
 - c. keluarga atau keturunan (*nasl*) adalah suatu kumpulan manusia yang dihubungkan melalui pertalian darah, perkawinan atau pengambilan anak angkat.
 - d. Harta atau kekayaan (*maal*) merupakan segala sesuatu yang dapat dihimpun, disimpan (dipelihara), dan dapat dimanfaatkan berdasarkan adat dan kebiasaan.
 - e. intelek atau akal (*aql*) yaitu kemampuan daya berfikir, memahami dan menganalisis.

Selanjutnya ia menitik beratkan sesuai tuntunan wahyu “kebaikan dunia dan akhirat” merupakan tujuan utamanya. Imam Al-Ghazali juga mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hirarki utilitas individu dan sosial yang tripartite melalui kebutuhan (*dharuriyat*), kesenangan atau kenyamanan (*haji*) dan kemewahan (*tahsiniat*). Kunci pemeliharaan dari lima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkat pertama, yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Kelompok kedua kebutuhan yang terdiri dari semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan kesukaran dalam hidup.⁴⁷

Dalam Islam terdapat masalah yang bertujuan untuk menentukan perbuatan suatu perbuatan. Ada pun beberapa sifat masalah, antara lain:⁴⁸

- 1) Masalah bersifat subjektif, dalam arti setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah sesuatu perbuatan merupakan suatu masalah

⁴⁷Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hal.88.

⁴⁸*Ibid*, hal. 11

atau bukan bagi dirinya. Kriteria masalah ini ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu.

- 2) Masalah orang perorangan akan konsisten dengan masalah orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep *pareto optimum*, yaitu keadaan optimal dimana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain.

Dalam konteks ini, sangat tepat untuk diterapkan bagi pemenuhan kesejahteraan manusia yang mencakup kebutuhan dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.⁴⁹

- a. *Dharuriyat*, adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya, ketika dharuriyat itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang, dan yang akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. Dharuriyat menunjukkan kebutuhan dasar ataupun primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia.
- b. *Hajiyat*, adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman, yaitu jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada. Hajiyat juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi maka akan bisa menambah value atau nilai kehidupan manusia.
- c. *Tahsiniyat*, adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Tahsiniyat juga bisa dikenali dengan kebutuhan tersier, atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.

⁴⁹Elzamaulida Merdekawati, *Potensi KontribusiUMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Guna Memperoleh Gelar Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2018), hal. 45-46

Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yaitu:⁵⁰

- a. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran.
- b. Pertanggung jawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap perilaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang sebenarnya, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum bukan kesejahteraan secara pribadi atau kelompok tertentu saja.
- c. *Takaful* (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik antar individu dan masyarakat, karena islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal secara seimbang.

Agar kesejahteraan dapat terwujud, pemerintah ikut berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier serta kebutuhan pelengkap lainnya. Pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencakup seluruh kebutuhan komplementer lainnya. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa upaya yang dilakukannya tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam sehingga kehidupan masyarakat sejahtera.

⁵⁰ Aisyah Amini, Analisis Pengembangan Industri Kecil KerajinanM Genteng Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pengrajin Perspektif Ekonomi Islam, (Skripsi Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Guna Memperoleh Gelar Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2018), hal. 46-47



DAFTAR FUSTAKA

- Abu Rahuam, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan long Ikis Kabupaten Paser" *Jurnal Pemerintahan*, Vol. 3 No. 4 (Desember 2015)
- Akbar Prabawa, "*Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan didesa Loa Lepu Kecamatan Tenggara Sebrang Kabupaten Kutai Karta Negara*" *Jrnal Ilmu Pemerintah* , Vol. 3. No. 228 (Desember 2015)
- Dasyaf Ibnu Samsudinn, Darusalam, *Prototype Negeri Yang Damai*, (Surabaya: Media Pers, 1994).
- Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung Pustaka Seti, 2013)
- Departemen Pendidikan, *Kamus Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Gamedia, 2017).
- Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2007).
- Imamudin Yuliandi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, LPPI, 2006).
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Social*, (Bandung: Mandar Maju, 1998)
- Lexy L Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Remaja Rosda Karya, 2001).
- M Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Martani Dan Lubis, *Teori Organisasi* (Bandung, Ghalia Indonesia).
- Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survai* (Jakarta: LP3ES, 1996)
- Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2002)
- Osnawi, *Analisis Program Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Way Kanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Study Pada*

Kecamatan Negri Besar (Lampung Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: IAIN Raden Intan Lampung, 2015).

P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: Alfabeta, 2007

P3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Jakarta; PT Grafindo Persada, 2011).

Rudi Badrudin, *Ekonomi Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UUPSTIM YKPN, 2012).

Rudi Badrudin, *Ekonomi Otonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy, *Terjemahan Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid IV*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1998).

Salim Bahreisy Dan Said Bahreisy, *Terjemahan Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid IV*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1998).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Syed Nawab Haider Naqfi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Terjemahan. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufukul Mubin (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009).

Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).